

BAB II

GAMBARAN UMUM PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan lingkungan sering kali menghadapi hambatan sehingga mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui berbagai regulasi seperti undang-undang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara, termasuk hak politik dan hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi. Penyandang disabilitas di Kota Semarang merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara dengan warga negara lainnya. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi, Kota Semarang memiliki keragaman jenis disabilitas. Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program, seperti penyediaan fasilitas publik yang lebih inklusif, layanan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, yang berada di lokasi strategis di pesisir utara Pulau Jawa. Berdiri sejak 2 Mei 1547, Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata yang berpenduduk sekitar 1,7 juta jiwa. Kota ini memiliki kondisi topografi yang unik, terbagi menjadi Kota Bawah untuk area pusat bisnis dan pemerintahan dan Kota Atas sebagai daerah perbukitan. Berikut adalah gambar daerah kota Semarang melalui peta.



Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang

(Sumber : PPID Kota Semarang,2024)

2.1.1. Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang memiliki letak yang strategis di Pantai Utara Jawa ($6^{\circ}50' - 7^{\circ}10'$ LS dan $109^{\circ}35' - 110^{\circ}50'$ BT), berbatasan dengan laut Jawa di Utara. Geografinya unik, terbagi menjadi kawasan dataran rendah (Semarang Bawah) dan perbukitan (Semarang Atas) dengan iklim tropis. Dapat dilihat melalui topografi dan morfologi, Kota Semarang memiliki kontur yang kontras antara wilayah pantai/dataran rendah di utara yang cenderung datar dengan kemiringan $0 - 2\%$ dan perbukitan di selatan dengan kemiringan $15 - 40\%+$. Daerah perbukitan yang menonjol seperti Gombel dan Jatingaleh. Batas wilayah Kota Semarang di bagian utara adalah laut Jawa, bagian selatan merupakan Kabupaten Semarang, bagian barat ada kabupaten Kendal, dan bagian timur adalah Kabupaten Demak. Kondisi klimatologi Kota Semarang yaitu beriklim tropis dengan dua musim (kemarau dan penghujan). Curah hujan tinggi pada bulan November hingga Mei yang berpotensi menyebabkan erosi dari wilayah selatan ke utara. Total luas wilayah administrasi Kota Semarang adalah $373,70 \text{ km}^2$, yang terdiri dari 16 Kecamatan. Karakteristik wilayahnya terbagi pula menjadi Semarang bawah sebagai pusat perdagangan, jasa, pemerintah, dan industri dengan struktur tanah campuran pasir dan lempung. Sedangkan Semarang atas menjadi wilayah pemukiman dan pendidikan.

Kondisi geografis Kota Semarang inilah yang riskan akan risiko bencana seperti banjir rob di wilayah utara dan longsor di daerah perbukitan selatan.

2.1.2. Kondisi Demografis Kota Semarang

Demografi Kota Semarang menunjukkan populasi yang kian bertambah. Pada tahun 2024 mencapai sekitar 1,7 juta jiwa dengan kepadatan tinggi. Mayoritas penduduknya berada pada usia produktif yaitu dengan rata-rata 15-65 tahun, sekitar 73% atau 1,9 juta jiwa dan didominasi oleh etnis Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sehari-hari, ada pula etnis Arab, Tionghoa, dan Melayu yang berbaur. Usia yang belum produktif yaitu dengan usia 0-14 tahun yaitu sekitar 20,75% per tahun 2024. Usia lanjut 60+ tahun sekitar 12,88%. Kepadatan penduduk mencapai sekitar 4.780 jiwa/km, dengan kecamatan terpadat yaitu Semarang Timur dan Tugu yang terjarang. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Tingkat agama yang diyakini penduduk Semarang tercatat per tahun 2020 yaitu dengan presentasi penganut agama Islam sebanyak 87,64% Kristen (Pristestan dan Katolik) sebanyak 11,70% dan penganut Buddha, Hindu, Konghucu sisanya. Mayoritas penduduk memiliki jenjang pendidikan SMA ke bawah dengan presentase yang signifikan pada kelompok belum tamat SD dan tidak/belum sekolah per tahun 2024.

2.1.3. Kondisi Perekonomian Kota Semarang

Perekonomian Kota Semarang pada tahun 2024 tercatat tumbuh positif sebesar 5,62%, didorong sektor industri pengolahan dengan kontribusi 28,35% diikuti konstruksi, jasa, dan perdagangan. Meskipun sedikit melambat dari 2023, PRDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp267,55 triliun didukung oleh peningkatan investasi dan mobilitas. Pada tahun sebelumnya PRDB per kapita meningkat mencapai 146,87 juta. Pada sektor investasi dan infrastruktur, pembangunan Tol Semarang-Demak seksi 1 mendorong sektor industri bertumbuh hingga 7,86%. Serta pelabuhan Tanjung Emas meningkatkan potensi ekspor dan perdagangan. Kemiskinan menurun ke angka 3,80% pada awal 2025, namun tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,99%. Serta, Kota Semarang mengalami deflasi sebesar 0,69% pada Januari 2025.

2.1.4. Sejarah dan Budaya Kota Semarang

Kota Semarang memiliki latar belakang sejarah yang panjang dan strategis sebagai kota pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa. Sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa, wilayah Semarang telah berfungsi sebagai jalur perdagangan dan titik pertemuan berbagai kelompok etnis. Pada abad ke-15, Semarang berkembang sebagai daerah pesisir yang berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Keberadaannya semakin menguat ketika bangsa Belanda menjadikan Semarang sebagai pusat administrasi dan perdagangan kolonial di Jawa Tengah pada abad ke-18. Pada masa kolonial, pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan kawasan permukiman Eropa di Kota Lama memperkuat posisi Semarang sebagai kota modern pada zamannya. Warisan sejarah tersebut masih dapat dilihat hingga kini melalui bangunan-bangunan bersejarah seperti Lawang Sewu, Gereja Blenduk, dan kawasan Kota Lama. Setelah kemerdekaan Indonesia, Semarang berkembang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah serta pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di wilayah tersebut.

Secara budaya, Kota Semarang dikenal sebagai kota multikultural yang dihuni oleh beragam kelompok etnis, seperti Jawa, Tionghoa, Arab, dan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman ini membentuk karakter budaya Semarang yang inklusif dan dinamis. Akulturasi budaya tercermin dalam tradisi, kuliner, seni, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Salah satu simbol budaya khas Semarang adalah tradisi Dugderan, yang menandai datangnya bulan Ramadan dan mencerminkan perpaduan unsur budaya Jawa, Islam, dan Tionghoa melalui ikon Warak Ngendog. Selain itu, keberadaan kawasan Pecinan, Masjid Agung Jawa Tengah, serta Kelenteng Sam Poo Kong menunjukkan toleransi dan keberagaman praktik keagamaan di Kota Semarang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Semarang dikenal memiliki budaya komunikasi yang terbuka dan adaptif, seiring dengan peran kota ini sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi di Jawa Tengah.

2.2 Penyandang Disabilitas Kota Semarang

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Disabilitas tidak semata-mata dipahami sebagai keterbatasan individu, melainkan sebagai hasil interaksi antara kondisi

fisik, intelektual, sensorik, dan/atau mental seseorang dengan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Perspektif ini menegaskan bahwa hambatan utama yang dialami penyandang disabilitas bersumber dari struktur sosial, kebijakan, dan lingkungan yang tidak aksesibel. Di Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan pusat aktivitas pemerintahan serta ekonomi regional, penyandang disabilitas merupakan bagian dari populasi perkotaan yang memiliki dinamika sosial yang kompleks. Tingginya mobilitas penduduk dan intensitas aktivitas publik di kota ini menuntut tersedianya fasilitas dan layanan publik yang ramah disabilitas. Namun demikian, dalam praktiknya, penyandang disabilitas di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan aksesibilitas infrastruktur, kurangnya layanan publik yang adaptif, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip inklusivitas dan nondiskriminasi.

Pemerintah Kota Semarang telah mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada pembangunan kota inklusif. Upaya tersebut mencakup penyediaan layanan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan terhadap organisasi dan komunitas difabel. Keberadaan komunitas penyandang disabilitas di Kota Semarang memiliki peran strategis sebagai agen advokasi dan pemberdayaan, sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Dalam konteks demokrasi lokal, penyandang disabilitas di Kota Semarang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun, partisipasi politik tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural, seperti kurangnya sosialisasi politik yang inklusif, keterbatasan akses terhadap informasi dan tempat pemungutan suara, serta belum optimalnya pemahaman penyelenggara pemilu mengenai kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan guna memastikan terwujudnya partisipasi politik penyandang disabilitas secara setara dan bermakna di Kota Semarang.

2.2.1. Data Statistik Penyandang Disabilitas Kota Semarang

Penyandang disabilitas di Kota Semarang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Data tersebut secara rinci di dapatkan berdasarkan kelurahan dan kecamatan, dengan pemerbaruan data per desember 2023. Data terbaru

mencakup berbagai jenis disabilitas termasuk fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Pemerbaruan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang secara berkala menyajikan tabel mengenai jumlah penyandang disabilitas per kelurahan, misalnya untuk Kecamatan Semarang Tengah dan Semarang Selatan, berdasarkan laporan per bulan Desember. Berikut data penyandang disabilitas Kota Semarang pada tahun 2023 yang terakhir diperbarui pada bulan Oktober 2024.

Kecamatan Semarang Tengah	Banyaknya Penyandang Disabilitas Menurut Kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah					
	Fisik	Netra/Buta	Rungu/Wicara	Mental/Jiwa	Fisik dan Mental	Disabilitas Lainnya
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Pakunden	2	1	1	5	-	-
Karang Kidul	1	1	2	1	-	1
Jagalan	1	-	5	1	-	1
Brumbungan	1	-	4	2	-	1
Mirot	-	-	2	3	-	2
Sabahan	-	-	6	3	-	1
Kranggan	-	-	-	1	-	2
Purwodinatan	-	-	3	4	-	1
Cauman	-	-	-	-	-	1
Bangun Harjo	2	-	-	1	-	1
Kembang Sari	1	-	3	2	-	-
Pandan Sari	-	1	-	2	-	1
Sekayu	1	1	1	1	-	-
Pendrikan Kidul	-	1	1	4	3	-
Pendrikan Lor	2	-	3	7	1	4
Kecamatan Semarang Tengah	11	5	31	37	4	16

Gambar 2. 2 Tabel Jumlah penyandang Disabilitas Kota Semarang

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2024)

Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas menurut kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah tahun 2023, dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas tersebar di seluruh kelurahan dengan jenis disabilitas yang beragam. Data ini menunjukkan bahwa isu disabilitas merupakan persoalan nyata yang perlu mendapat perhatian serius, khususnya dalam perumusan kebijakan publik dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak politik dalam Pilkada. Secara keseluruhan, Kecamatan Semarang Tengah memiliki 104 penyandang disabilitas, dengan kategori terbanyak

adalah disabilitas mental/jiwa sebanyak 37 orang, diikuti oleh disabilitas rungu/wicara sebanyak 31 orang. Jumlah ini menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di wilayah ini merupakan kelompok yang memiliki hambatan dalam komunikasi dan kondisi psikososial, yang secara langsung berpengaruh terhadap akses informasi, termasuk informasi politik dan kepemiluan. Kondisi ini menuntut adanya metode sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih adaptif dan inklusif.

Selanjutnya, kategori disabilitas fisik tercatat sebanyak 11 orang, sedangkan disabilitas netra/buta sebanyak 5 orang. Jumlah ini relatif lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya, namun tetap membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait aksesibilitas fisik dan penyediaan alat bantu dalam setiap tahapan pemilu. Sementara itu, penyandang disabilitas dengan kategori fisik dan mental berjumlah 4 orang, serta disabilitas lainnya sebanyak 16 orang, yang menunjukkan adanya kompleksitas kebutuhan pelayanan bagi penyandang disabilitas dengan kondisi ganda atau di luar klasifikasi utama. Dilihat dari persebaran wilayah, beberapa kelurahan memiliki jumlah penyandang disabilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan kelurahan lain. Kelurahan Pendrikan Lor tercatat sebagai kelurahan dengan jumlah penyandang disabilitas mental/jiwa tertinggi, yaitu sebanyak 7 orang, serta memiliki variasi jenis disabilitas yang cukup lengkap. Selain itu, Kelurahan Gabahan dan Jagalan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas rungu/wicara yang cukup signifikan, masing-masing sebanyak 6 orang dan 5 orang. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan sosialisasi berbasis wilayah dan jenis disabilitas agar penyampaian informasi kepemiluan dapat lebih efektif. Sementara itu, beberapa kelurahan seperti Kauman dan Kranggan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang relatif rendah dan hanya didominasi oleh kategori tertentu. Kondisi ini dapat mencerminkan dua kemungkinan, yaitu jumlah penyandang disabilitas yang memang lebih sedikit atau adanya keterbatasan dalam pendataan. Oleh karena itu, akurasi dan pembaruan data menjadi aspek penting dalam memastikan seluruh penyandang disabilitas terakomodasi sebagai pemilih dalam Pilkada.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Kecamatan Semarang Tengah memiliki karakteristik yang heterogen baik dari segi jenis disabilitas maupun persebaran wilayah. Keberagaman ini menuntut adanya kebijakan dan strategi sosialisasi serta pendidikan politik yang tidak bersifat seragam. Penyelenggara

pemilu dan pemerintah daerah perlu menyesuaikan metode sosialisasi dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok disabilitas agar partisipasi politik penyandang disabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bermakna dan substantif.

2.3 Profil Komunitas Roemah Difabel

Roemah Difabel Semarang merupakan komunitas sosial yang bergerak dalam bidang pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Komunitas ini didirikan pada tahun 2014 atas inisiatif orang tua anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan ruang bersama yang inklusif dan non-diskriminatif bagi berbagai ragam disabilitas. Dalam perkembangannya, Roemah Difabel tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga bertransformasi sebagai wadah yang merangkul berbagai jenis disabilitas dalam satu lingkungan yang suportif dan partisipatif. Secara kelembagaan, Roemah Difabel berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu penyandang disabilitas. Berbagai program yang dijalankan meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, serta pengembangan kreativitas anggota, dengan tujuan mendorong kemandirian sosial dan ekonomi. Selain itu, komunitas ini juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusivitas serta penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas

Dalam praktiknya, Roemah Difabel turut berperan dalam advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan partisipasi publik. Berbagai kegiatan seperti pameran karya, pelatihan wirausaha, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi bagian dari upaya memperluas ruang partisipasi difabel dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemberdayaan internal, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan aksesibel. Meskipun telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, Roemah Difabel Semarang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, serta dukungan yang belum merata. Hal tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan secara berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan komunitas ini tetap memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang.